



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 161 /SEK/KU.01/1/2021 27 Januari 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja  
Calon Pegawai Negeri Sipil

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung RI;
  2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
  3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
  4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
  5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;  
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI mengenai pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya formasi tahun 2019, demi kelancaran dan tertib administrasi pembayaran gaji serta tunjangan kinerja, dengan ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gaji CPNS Bulan Februari 2021 dapat dibayarkan apabila CPNS telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 dengan dibuatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Apabila SPMT CPNS melebihi tanggal 1 Februari 2021, maka gaji bulan Februari 2021 tidak dapat dibayarkan dan dibayarkan sejak bulan berikutnya berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-254/PB/2019 tanggal 2 April 2019 perihal Petunjuk Pembayaran Gaji Induk pada Hari Pertama atau Hari Pertama Kerja ;
3. Tunjangan kinerja CPNS dengan SPMT terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 dibayarkan pada bulan berikutnya melalui mekanisme susulan atas dasar kehadiran kerja dan capaian kinerja bulan Februari 2021;
4. Satuan Kerja menginput data CPNS dan kehadiran kerja pada aplikasi Komdanas sesuai SPMT setelah pengajuan tunjangan kinerja bulan Februari 2021;
5. Tunjangan kinerja CPNS dibayarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

6. Tunjangan kinerja CPNS bulan Maret 2021 dibayarkan berdasarkan kehadiran kerja dan capaian kinerja bulan Februari 2021;
7. Besaran tunjangan kinerja CPNS yang dibayarkan adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja berdasarkan penetapan kelas jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam SK KMA 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Apabila kelas jabatan CPNS belum diatur di dalam SK KMA Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, serta SK KMA Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 sebagaimana tersebut pada poin 7, maka kelas jabatan yang bersangkutan disetarakan dengan kelas jabatan dari pelaksana lain yang tercantum pada kedua SK KMA dimaksud di atas dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta unit kerja CPNS yang bersangkutan sampai dengan keluarnya persetujuan penetapan kelas jabatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Tunjangan kinerja CPNS dengan jabatan fungsional yang belum mendapat penetapan dan belum dilantik sebagai pejabat fungsional dibayarkan setara dengan kelas jabatan pelaksana dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan dan unit kerja yang bersangkutan;
10. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dapat diakses di [sikep.mahkamahagung.go.id](http://sikep.mahkamahagung.go.id).

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

  
Sekretaris Mahkamah Agung,  
Republik Indonesia  
  
Hasbi Hasan

Tembusan :

1. Kepala Biro Keuangan BUA MA RI;
2. Kepala Biro Perencanaan BUA MA RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian BUA MA RI.